



Optimalisasi Data Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

I Gede Suryantara
KPP Pratama Denpasar Timur

Herru Widiatmanti
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Korespondensi: gsuryantara@gmail.com, widiatmanti@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[05062022]

Dinyatakan Diterima
[06082022]

KATA KUNCI:

PPH final pengalihan tanah dan/atau bangunan,
penggalan potensi

KLASIFIKASI JEL:

H26

ABSTRAK

This research was conducted with the aim of supporting the provision of potential excavation data at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur in the land and/or building transfer business sector. The action phase of this change is carried out through identification of housing data or plots, identification of taxpayers (WP) who have a business of transferring land and/or buildings, pairing data on housing or plots with data of taxpayers who have a business of transferring land and/or buildings, follow-up Account Representative (AR) explores the potential between the prevailing price at the location and the Tax Calculation Basis (DPP), and then AR will confirm to the taxpayer for the existing potential. Benefits for the organization, to support the achievement of Key Performance Indicators (KPI), to increase employee capacity through potential exploration, and as an control tool for AR in carrying out supervisory functions to taxpayers. Benefits for stakeholders, to control for taxpayers regarding tax payments in accordance with the provisions, to change taxpayers' behavior so that they are obedient in carrying out their tax obligations and rights in accordance with their respective business field classifications (KLU), and to update data for fiscal monographs that can be used for other institutions.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung penyediaan data penggalan potensi pada KPP Pratama Denpasar Timur (KPP Pratama Denpasar Timur) pada sektor usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan. Tahap kegiatan aksi perubahan ini dilaksanakan melalui identifikasi data perumahan atau kavling, identifikasi Wajib Pajak (WP) yang mempunyai usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan, penyandingan data perumahan atau kavling dengan data WP yang mempunyai usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan, tindak lanjut *Account Representative* (AR) menggali potensi antara harga yang berlaku di lokasi dengan Dasar Perhitungan Pajak (DPP), dan dilanjutkan AR akan melakukan konfirmasi ke WP atas potensi yang ada. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini tidak hanya bagi KPP Pratama Denpasar Timur, tapi juga bagi *stakeholder* terkait di luar KPP. Manfaat bagi organisasi antara lain untuk penunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk meningkatkan kapasitas pegawai melalui penggalan potensi, dan sebagai alat kontrol AR dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada WP. Manfaat bagi *stakeholder* antara lain sebagai alat kontrol kepada WP terkait pembayaran pajak sesuai ketentuan, sebagai alat pengubah perilaku WP agar patuh dalam melaksanakan kewajiban serta hak-hak perpajakannya sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha (KLU) masing-masing, dan untuk *updating* data untuk monografi fiskal yang dapat digunakan bagi institusi lainnya.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid19 yang melanda sejak tahun 2020 menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur pergerakan masyarakat untuk mengurangi dampak Covid19. Berbagai kebijakan yang diterapkan antara lain pembatasan jumlah pekerja yang beraktivitas di tempat kerja, pembatasan aktivitas tempat kerumunan seperti pasar dan pusat belanja, pemberlakuan jam aktivitas masyarakat, pembatasan jam layanan umum dan transportasi, penutupan tempat wisata, termasuk kewajiban tes untuk identifikasi virus bagi orang yang bepergian.

Dampak pandemi Covid19 sangat memukul kegiatan pariwisata di Bali beserta lini ekonomi yang menyertainya. Tempat wisata, hotel, tempat makan, layanan agen perjalanan, transportasi umum, pekerja seni, dan lini ekonomi lainnya terkait pariwisata merasakan dampak ini. Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi KPP di Bali untuk menggali penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) karena aktivitas ekonomi yang menurun sangat signifikan. KPP Pratama Denpasar Timur juga terkena imbas atas potensi penerimaan pajak yang menurun.

Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 di KPP Pratama Denpasar Timur disumbang dari sektor yang terkait pariwisata. Selain itu sektor konstruksi juga menjadi potensi penurunan penerimaan karena proyek yang terkait pembangunan seperti bendungan, irigasi, dan pekerjaan konstruksi di Bali, sebagian terdapat di KPP Pratama Denpasar Timur. Namun sejak pandemi Covid19, kontribusi penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut menurun drastis. Secara garis besar, 5 sektor penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur yang paling terdampak disajikan pada tabel 1.

Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul "Optimalisasi Data Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

- Bagaimana mengidentifikasi data pengalihan tanah dan/atau bangunan yang terindikasi merupakan suatu usaha atau bisnis?
- Bagaimana menyandingkan data pengalihan tanah dan/atau bangunan yang terindikasi usaha atau bisnis dengan data di lapangan?
- Apa upaya yang perlu dilakukan untuk menggali potensi pajak dan melakukan pengawasan secara berkelanjutan?

1.2. Gambaran Umum

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 sebesar Rp1.229,58 triliun, perlu ditetapkan strategi pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021. Salah satunya adalah melalui sumber baru penerimaan pajak. Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-91/PJ/2021 hal Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2021 menjelaskan berbagai upaya

mewujudkan strategi dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2020-2024 yang terkait dengan tujuan penerimaan negara tersebut, ditetapkan program prioritas untuk tahun 2021 yaitu:

- pengawasan WP Orang Pribadi kategori *High Wealth Individuals* (HWI) dan WP Grup;
- pengawasan berbasis sektoral;
- pengawasan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- pengawasan atas transaksi yang terindikasi *Transfer Pricing*; dan
- sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

Salah satu program prioritas yang disampaikan adalah pengawasan berbasis sektoral. Mengacu pada data penerimaan tahun 2021, KPP Pratama Denpasar Timur mendapatkan target penerimaan pajak sebesar Rp792 milyar. Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan maka perlu menggali sektor lain yang diindikasikan dapat memberikan kontribusi penerimaan. Hal ini juga sejalan dengan program prioritas penerimaan pajak yang optimal di mana salah satunya adalah penggalan potensi dari sumber baru penerimaan pajak. Salah satu sektor yang memungkinkan untuk penggalan potensi penerimaan adalah *real estate* atau properti.

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia mengindikasikan penjualan properti residensial meningkat pada triwulan I 2021. Hal ini tercermin dari penjualan properti residensial yang tumbuh 13,95% *year on year* (yoy), meningkat dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 20,59% (yoy). Peningkatan penjualan properti residensial tersebut terjadi pada seluruh tipe rumah. Mustika (2016) melalui penelitiannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak lagi memandang permintaan rumah tinggal hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi telah menganggap sebagai sarana investasi yang menarik. Dari penjelasan tersebut, permintaan rumah atau kavling tentunya akan terus ada dan meningkat seiring kebutuhan manusia akan tempat tinggal dan investasi.

Irawan dan Benu (2021) menjelaskan bahwa dalam menentukan nilai sesungguhnya suatu properti terdapat kendala berupa sulitnya mencari data pembandingan untuk sebagian objek penilaian dan sulitnya mencari lokasi objek penilaian yang memiliki alamat kurang lengkap. Sejalan dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk penggalan potensi tanah dan/atau bangunan, khususnya terhadap kegiatan yang terindikasi sebagai usaha atau bisnis pengalihan tanah dan/atau bangunan, memanfaatkan informasi koordinat untuk memudahkan identifikasi lokasi dan pengumpulan harga yang ditawarkan.

Mengacu kegiatan penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus 2021, bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya (selanjutnya disebut PPh final), terdapat peningkatan jumlah berkas

yang disampaikan oleh WP di mana pada tahun 2020, jumlah berkas yang masuk di Seksi Pelayanan sebanyak 905 berkas, sedangkan pada tahun 2021, sebanyak 1.425 berkas.

Hasil sampling di lapangan menggunakan data pemenuhan kewajiban PPh final, diperoleh beberapa permasalahan diantaranya:

- a. informasi bahwa adanya ketidaksesuaian penulisan alamat dari data dimaksud dengan pengamatan di lapangan;
- b. harga yang digunakan dalam formula penghitungan PPh final tidak mencerminkan harga yang ditawarkan di lapangan; dan
- c. adanya nama yang sama muncul beberapa kali namun tidak terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat potensi yang masih belum tergalai dari PPh final. Langkah selanjutnya adalah perlu memastikan bahwa sasaran penggalan potensi lebih spesifik untuk kemudahan pengumpulan data pembandingan dan pengawasan.

2. KERANGKA TEORI

Potensi yang muncul dari pengalihan tanah dan/atau bangunan, khususnya dari pengembangan perumahan atau kavling siap bangun, disebabkan oleh beberapa faktor. Sigit (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa lokasi, fasilitas, desain, lingkungan, dan karakteristik *cluster* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perumahan. Hidayati dan Budi (2001) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu properti dibedakan menjadi 4 faktor yaitu faktor permintaan dan penawaran, faktor fisik properti, faktor lokasi dan peletakan, dan faktor kebangsaan dan politik. Faktor yang dianggap paling kuat di properti adalah faktor lokasi karena lokasi memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai properti. Dua buah properti dengan bentuk fisik yang sama pada lokasi berbeda memiliki nilai properti yang berbeda pula. Semakin jauh dari pusat kota maka nilainya akan semakin rendah, dikarenakan kota merupakan pusat segala aktivitas kehidupan manusia. Nilai atau harga pengalihan ini tentunya berdampak pada peningkatan potensi pajak.

2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A mengamanatkan bahwa pajak adalah pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sejak tahun 1983, sudah diterbitkan berbagai undang-undang perpajakan dan berbagai perubahan hingga tahun 2021. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan bahwa penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya Pasal 1 pada undang-undang yang sama, menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.3. PPh Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, menjelaskan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pasal 1 ayat (2) pada peraturan pemerintah yang sama menjelaskan bahwa penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya, menjelaskan bahwa bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) terutang di lokasi tanah dan/atau bangunan berada. Secara sederhana, WP yang mempunyai usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP di mana lokasi obyek yang dialihkan berada.

2.4. Pengusaha Kena Pajak

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengamati serta menganalisis data pemenuhan kewajiban PPh final serta data perumahan dan kavling dari Google di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur.

3.1 Kajian Pustaka

Dalam metode penelitian ini sumber data diperoleh dengan pengumpulan data sekunder yaitu rekapitulasi data terkait pengalihan tanah dan/atau bangunan dan membaca kajian literatur ketentuan perpajakan terkait hal tersebut. Data yang didapat merupakan data sekunder di KPP Pratama Denpasar Timur serta mekanisme tindak lanjut penggalan potensi pajak.

3.2 Penelitian Lapangan

Penulis mengajukan permintaan data secara langsung ke seksi terkait di KPP Pratama Denpasar Timur berkaitan dengan topik yang diangkat. Pengumpulan data dan informasi dalam metode ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber terkait. Wawancara dengan metode tidak terstruktur (*non-standardised/structured*) dilakukan dengan *one-on-one interview* melalui tanya jawab dengan pegawai di Seksi Pelayanan dan Seksi Penjamin Kualitas Data (PKD). Alasan penulis memilih metode ini adalah agar memperoleh jawaban dan penjelasan yang lengkap dari narasumber serta dapat menanyakan pertanyaan tambahan jika terdapat ketidakpahaman mengenai jawaban dari narasumber.

2. Teknik Observasi

Penulis mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah data-data pendukung, baik melalui internet atau pengambilan sampling di lapangan untuk memahami informasi dari data penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pengumpulan data penawaran perumahan dan kavling

Pengumpulan data penawaran perumahan dan kavling tahun 2021 dilakukan melalui Seksi PKD dengan memanfaatkan informasi yang ada di Google. Informasi yang diperoleh berupa nama perumahan atau kavling, alamat, koordinat dan beberapa informasi pendukung seperti nomor telepon dan *website*. Berdasarkan nama perumahan dan kavling, selanjutnya dikumpulkan data harga penawaran sesuai lokasi. Hasil kegiatan pengumpulan data ini disajikan dalam Tabel 2.

4.2. Pengumpulan data pemenuhan kewajiban PPh final atas pengalihan tanah dan/atau bangunan

Pengumpulan data pemenuhan kewajiban PPh final tahun 2021 melalui Seksi Pelayanan. Informasi yang diperoleh antara lain nama, NPWP, dan alamat WP, lokasi obyek yang dialihkan, besaran PPh final disetor dan Dasar Perhitungan Pajak (DPP), serta nomor sertifikat dan Nomor Obyek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Identifikasi awal atas usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan di dasarkan nama WP, NOP, atau nomor sertifikat yang muncul berulang kali. Selanjutnya berdasarkan nomor sertifikat dan NOP PBB maka dapat diidentifikasi koordinat obyek yang dialihkan. Hasil kegiatan ini disajikan pada tabel 3.

4.3 Sandingan Data

Untuk memastikan kesesuaian lokasi data pemenuhan kewajiban PPh final maka perlu disandingkan dengan data penawaran perumahan dan kavling. Data penawaran perumahan dan kavling diolah dan disajikan memanfaatkan *Google earth* dengan hasil sebagaimana Gambar 1. Selanjutnya data pemenuhan kewajiban PPh final atas pengalihan tanah dan/atau bangunan diolah dan disajikan memanfaatkan *Google earth* sebagaimana Gambar 2.

Sandingan tersebut akan menghasilkan pertampalan yang mengidentifikasi kesamaan koordinat antara data pemenuhan kewajiban PPh final dan data penawaran perumahan dan kavling. Sajian sandingan dua data tersebut sebagaimana Gambar 3.

4.4. Potensi

Ketidaksesuaian antara DPP dan harga penawaran perumahan atau kavling tersebut merupakan potensi pajak yang bisa digali, baik PPh maupun PPN. Berdasarkan pembayaran PPh final maka akan bisa diketahui DPP yang digunakan oleh WP saat memenuhi kewajiban PPh final tersebut. Selanjutnya berdasarkan harga yang disajikan pada penawaran perumahan atau kavling, dianalisis perbedaan dengan DPP. Adanya selisih dari DPP dan harga merupakan potensi pajak menjadi bahan klarifikasi kepada WP. Selain itu dari perhitungan harga dengan unit terjual tiap tahun dapat diidentifikasi potensi PPN yang ada sehingga dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2021 dari WP yang memenuhi kewajiban PPh final memberikan kontribusi cukup signifikan pada pencapaian penerimaan KPP Pratama Denpasar Timur, di mana terjadi kenaikan hingga 29% daripada tahun 2020. Realisasi PPh final tahun 2020 dan 2021 tersaji pada tabel 4.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan optimalisasi data pengalihan tanah dan/atau bangunan sebagai potensi penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur memberikan banyak manfaat. Manfaat ini tidak hanya bagi KPP Pratama Denpasar Timur, tapi juga bagi *stakeholder* di luar KPP yang terkait. Secara umum, manfaat yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua, internal organisasi dan *stakeholder* di luar organisasi, yaitu:

a. bagi organisasi:

- alat penunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Denpasar Timur, khususnya terkait penerimaan pajak;
- meningkatkan kapasitas AR melalui bedah potensi sektoral; dan
- alat kontrol AR dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada WP dalam wilayahnya.

b. bagi *stakeholder*:

- alat kontrol kepada WP terkait pembayaran pajak sesuai ketentuan;
- alat pengubah perilaku WP agar patuh dalam melaksanakan kewajiban serta hak-hak perpajakannya sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha (KLU) masing-masing; dan
- *updating* data untuk monografi fiskal yang dapat digunakan bagi institusi lainnya.

Kegiatan penggalan potensi yang dijalankan tidak hanya berhenti pada kegiatan yang ditentukan pada satu jenis sektor ekonomi. Sebagai salah satu upaya meningkatkan potensi penerimaan dan menunjang rencana penerimaan, keberlanjutan kegiatan ini tetap perlu dijalankan. Keberlanjutan kegiatan ini juga tidak hanya bertujuan pada jangka pendek namun juga komitmen mewujudkan tujuan jangka menengah dan jangka panjang agar tercapai.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian yang dilakukan merupakan langkah awal penggalan potensi dari WP yang melakukan usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan namun tidak menyampaikan kegiatan usahanya dalam perpajakan secara detail. Kendala yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pandemi Covid19 membuat keterbatasan dalam pengambilan sampling di lapangan sehingga kegiatan di kantor dioptimalkan melalui pemanfaatan data dari seksi terkait dan melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

1. Dokumen publik

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-91/PJ/2021 hal Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2021

2. Dokumen lainnya

Hidayati, W. dan Harjanto, B. (2001). Konsep Dasar Penilaian Properti edisi pertama. BPFE Yogyakarta.
Mustika, D. (2016) Analisis Penilaian Properti Berupa Rumah Tinggal di Perumahan Citraland City Samarinda Pada KJPP. Aksa, Nelson & Rekan. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Sigit, Faurantia F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Properti Pada Perumahan Berkonsep Cluster (Studi Kasus Perumahan J City). Universitas Sumatera Utara.

Irawan, F. dan Benu, Ferdy S. (2021). Aspek Penilaian Dalam Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Jurnal Manajemen Keuangan Publik.

Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Triwulan I 2021 Bank Indonesia, 27 Mei 2021.

Tabel 1. Lima sektor penerimaan paling terdampak Covid19

Sektor	Nama	2019	2020	Tumbuh (2020-2019)
1	Konstruksi	32.093.424.579,00	-8.269.202.872,00	-125,77
2	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	7.022.224.075,00	2.249.218.795,00	-67,97
3	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	17.279.344.366,00	7.997.192.323,00	-53,72
4	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	18.664.374.173,00	9.215.466.229,00	-50,63
5	Real Estate	2.084.930.184,00	1.097.572.751,00	-47,36

Sumber : Aplikasi MPN 2021, data diolah

Tabel 2. Data penawaran perumahan dan kavling di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur sampai dengan bulan Agustus 2021

Real Category	Business Name	Address	Phone	Website	Lat	Long
perumahan	Bali Arum Tukad Balian	Jl. Tukad Balian No.119b, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227	9617432515		115,241406	-8,699172
perumahan	Bali houseware	Mekar Jaya II. BLOK B, Gg. VIII No.2, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222	81913423673		115,206951	-8,707353
Pembangunan Perumahan	BALI RICH RESIDENCE	87H6+7RW, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227			115,262081	-8,671773
perumahan	BALI SURYA RESIDENCE	Jl. Mekar II Di No.47, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222			115,208255	-8,707892
perumahan	Banjar Kawan Serangan	Jl. Tukad Punggawa No.38, Serangan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80229			115,234225	-8,724020
Kantor Perusahaan	Big House at Renon	Jl. Dr. Muwardi, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239			115,237579	-8,670496
perumahan	Cahyadi	Jl. Kerta Dalem XIV No.5, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224	85238909100		115,236550	-8,698814
Gedung Apartemen Berfasilitas Komp	Cluster Sewa Syariah	Br. Kelod, Jl. Tukad Badung Tim. No.17, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224	81338573853		115,239690	-8,690737
perumahan	Darma Rumah Bali	Jl. Tukad Penataran, Serangan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80229			115,235299	-8,722363
perumahan	DD homestay	Jl. Tukad Punggawa Gg. Buntu No.11, Serangan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222	81337670903		115,231248	-8,724270
perumahan	Deva Kresna Rumah Kost	Jl. Tukad Balian, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227	87860347679		115,240862	-8,695129
Pembangunan Perumahan	Fuji Home Renon Residence	Jl. Tukad Balian, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227	9614723564	https://www.fujihomejapan.com	115,243973	-8,684708
perumahan	Gerilya Renon	Jl. Tukad Yeh Aya IX No.F no 5A, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234			115,239987	-8,680901
perumahan	Graha Fahreza Besakih Pemogan	75MX+XGJ, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80221			115,198779	-8,715030
Housing complex	Graha Laksamana Mulia Residence	Unnamed Road, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239			115,242397	-8,670080
perumahan	Griya Carik Pedungan	Jl. Pesona XX No.7, Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar City, Bali 80222			115,211745	-8,708070
Kompleks Townhouse	Griya loka tukad balian	76WQ+VVP, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224			115,239707	-8,702787
perumahan	Griya Otan	Jl. Tukad Otan No.57, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80225			115,225578	-8,683032
perumahan	Griya Pempatan	Jl. Hayam Wuruk No.138, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239			115,236799	-8,657007
Perumahan	Griya Renon	Jl. Raya Puputan No.124, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234			115,232810	-8,673180
perumahan	Griya Saelus Indah	Jl. Pulau Saelus II Gg. Mawar, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80223	816577771		115,211905	-8,689195
perumahan	Griya suwung	Jl. Kerta Rahayu Suwung kangin No.A34, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224			115,237564	-8,707155
perumahan	Henry's Home	Jl. Tirta Akasa Gg. IV No.88, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80228			115,255391	-8,700243
Perumahan	ISTANA REGENCY	76Q9+GJX, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80223			115,219115	-8,711138
perumahan	Iyandana property bali	Perumahan citra mas, Jl. Noja, Kesiman, East Denpasar, Denpasar City, Bali 80235	87860024499	http://www.iyandanaproperty.com	115,235312	-8,640066
perumahan	JACK'S HOUSE	Jl. Mekar II No.22b, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80221			115,206708	-8,710495
perumahan	Jawik home VVIP	Jl. Danau Tondano IV Gg. Celuk III No.15c, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80239	80989897212		115,255307	-8,689728
perumahan	Jual Tanah Kavling Premium Jl. T. Gg. Tgh. Abdul Gani Jl. Taman Pancing Timur No.8a, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234	82145616481			115,193871	-8,704452
Kantor Perusahaan	Kantor Pemasaran	Jl. RY Puputan No.48, Dangin Puri Klot, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234	81238201203		115,221520	-8,672310
perumahan	KARUNING TUKAD BAlian RENON	Gg. Dano, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227	87861651478		115,244852	-8,697310

Sumber: Seki PKD, Google, diolah

Tabel 3. Data pemenuhan kewajiban PPh final atas pengalihan tanah dan/atau bangunan sampai dengan bulan Agustus 2021

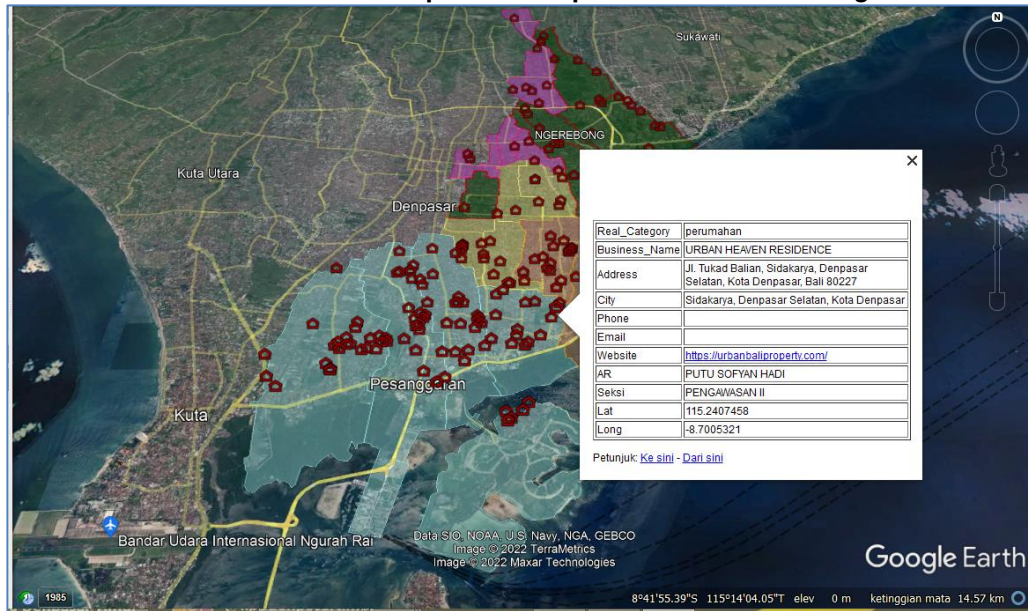
NPWP Penjual	NAMA WAJIB PAJAK	NOP	Alamat Objek	Luas Tanah/Bangunan	Harga Sesuai Bukti Transaksi	Jumlah Bayar	Long	Lat	AR Wilayah	Seksi	AR Pengampu	Seksi	KPP Penjual
1411026990	DESAK NYOMAN KA	5171020002003	JL HAYAM WURUK GG 149 XK11	40/70	Rp. 266.120.000	6.653.000	115,242120	-8,660316	DEWA MADE YOGA DV	Seksi Pengawal	DEWA MADE YOGA DV	Seksi Pengawasan III	PRATAMA DENPA
1411026990	DESAK NYOMAN KA	5171020002003	JL HAYAM WURUK GG 149 XK11	201/148	Rp. 1.028.368.000	25.709.200	115,242120	-8,660316	DEWA MADE YOGA DV	Seksi Pengawal	DEWA MADE YOGA DV	Seksi Pengawasan III	PRATAMA DENPA
26856844190	DHANA ARDJANA I	5171020010004	JL LETDA MADE PUTRA 23	61/90	Rp. 600.000.000	15.000.000	115,221230	-8,660836	PUTU HELLYK SUTRESN	Seksi Pengawal	PUTU HELLYK SUTRESN	Seksi Pengawasan V	PRATAMA DENPA
26856844190	DHANA ARDJANA I	5171020010004	JL LETDA MADE PUTRA 23	59/90	Rp. 600.000.000	15.000.000	115,221230	-8,660836	PUTU HELLYK SUTRESN	Seksi Pengawal	PUTU HELLYK SUTRESN	Seksi Pengawasan V	PRATAMA DENPA
67123040790	DWI YUSANTARA	5171010010104	SB UCULAN PEMOGAN DENPASAR	155/0	Rp. 232.500.000	5.812.500	115,189375	-8,718929	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawal	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawasan II	PRATAMA DENPA
67123040790	DWI YUSANTARA	5171010010104	SB UCULAN PEMOGAN DENPASAR	94/0	Rp. 141.000.000	3.525.000	115,189375	-8,718929	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawal	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawasan II	PRATAMA DENPA
67123040790	DWI YUSANTARA	5171010010104	SB UCULAN PEMOGAN DENPASAR	155/0	Rp. 232.500.000	5.812.500	115,189375	-8,718929	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawal	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawasan II	PRATAMA DENPA
67123040790	DWI YUSANTARA	5171010010104	SB UCULAN PEMOGAN DENPASAR	388/0	Rp. 582.000.000	14.550.000	115,189375	-8,718929	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawal	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawasan II	PRATAMA DENPA
67123040790	DWI YUSANTARA	5171010010104	SB UCULAN PEMOGAN DENPASAR	94/0	Rp. 141.000.000	3.525.000	115,189375	-8,718929	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawal	NI PUTU SURIANTARI	Seksi Pengawasan II	PRATAMA DENPA
14012841490	EDDY JUNAEDI JAY	5171010080801	Jl. TUNGGAH BINGIN	930/408	Rp. 4.209.600.000	105.240.000	115,252312	-8,696702	I GUSTI AGUNG BAGU	Seksi Pengawal	I GUSTI AGUNG BAGU	Seksi Pengawasan II	PRATAMA DENPA
14012841490	EDDY JUNAEDI JAY	5171010080801	Jl. TUNGGAH BINGIN	52/0	Rp. 208.000.000	5.200.000	115,252312	-8,696702	I GUSTI AGUNG BAGU	Seksi Pengawal	I GUSTI AGUNG BAGU	Seksi Pengawasan II	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 198.400.000	4.960.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023	Jl. Jepun Pipil No.21, Kesiman Ka	0	Rp. 210.000.000	5.250.000	115,252712	-8,634332	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawal	MADE NIDYA LESTARI	Seksi Pengawasan VI	PRATAMA DENPA
35374794290	GEDE OKA PERMAN	5171020015023											

Tabel 4. Realisasi PPh final atas pengalihan tanah dan/atau bangunan

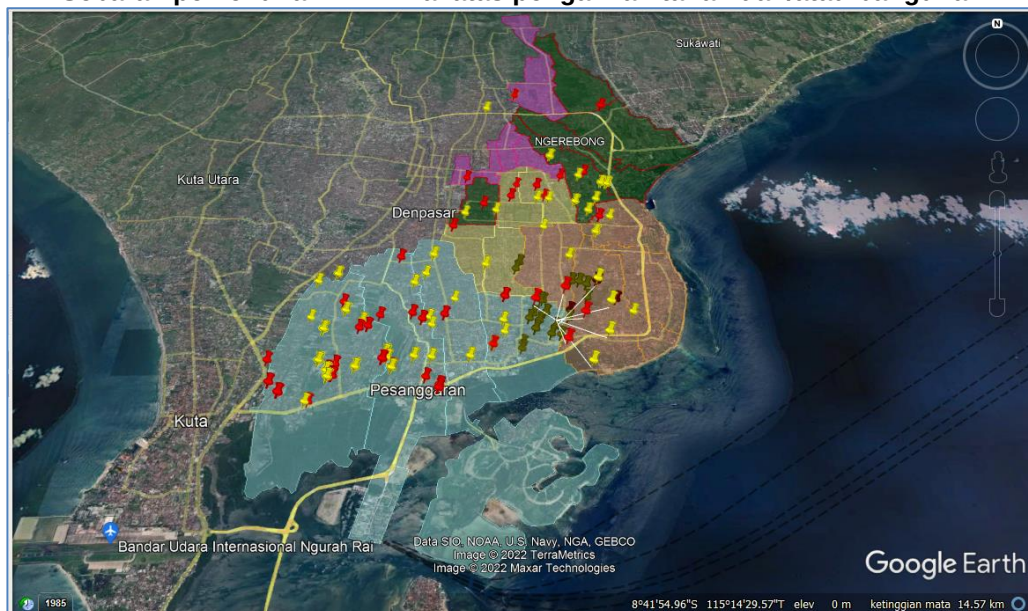
Pajak/Tahun	2020	2021	Kenaikan
PPh final	46.981.790.939	60.686.529.792	29,17%
SKP	67.800.000	1.569.532.158	2214,94%

Sumber: Modul Penerimaan Negara

Gambar 1. Sebaran penawaran perumahan dan kavling



Gambar 2
Sebaran pemenuhan PPh final atas pengalihan tanah dan/atau bangunan



Gambar 3
Sandingan sebaran perumahan dan kavling dengan pemenuhan PPh final

